

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam melaksanakan pemerintahannya, semua negara di dunia pasti mengupayakan yang terbaik untuk kepentingan masyarakat. Bentuk upaya tersebut berupa pembangunan yang adil dan juga merata pada semua daerah. Indonesia merupakan salah satu dari banyaknya negara yang mengupayakan pembangunan. Hal ini sesuai dengan apa yang tertera dalam undang - undang dasar 1945 yang menjadi dasar dalam pembentukan negara. Yakni untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga mewujudkan keadilan sosial untuk rakyat Indonesia (UUD 1945). Pembangunan ialah semua rangkaian usaha yang secara sadar dilakukan untuk menuju arah lebih baik yang kehadirannya didambakan dan diharapkan oleh semua masyarakat. (Simbolon, Dkk., 2021). Tujuan dari pembangunan adalah tentang pemerataan dalam upaya menyejahterakan masyarakat (Lestari, 2021). Sehingga semua masyarakat dapat memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses fasilitas yang sudah disediakan oleh negara. Untuk mewujudkan pembangunan yang berkualitas tersebut, beberapa negara dunia yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) membuat suatu komitmen global dalam upaya mensejahterakan masrakat yang tertuang dalam 17 tujuan serta sasaran agenda SDGs (Sustainable Development Goals) tahun 2030. Komitmen tersebut mencakup pengentasan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan yang berkualitas,

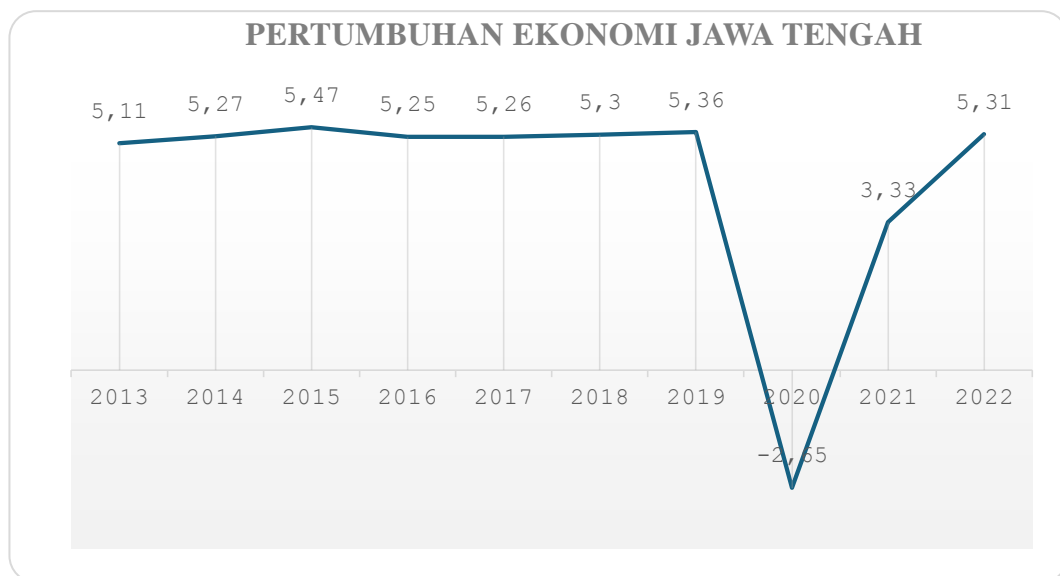
penanganan perubahan iklim dan ekosistem lingkungan, berkurangnya kesenjangan dan lain sebagainya.

Pemerintah pusat mengalihkan kekuasaannya dan juga wewenang kepada pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahannya sendiri lewat kebijakan desentralisasi. Kebijakan tersebut meliputi penyerahan terkait perencanaan, kewenangan dan pembuatan keputusan. Kelebihan dari diterapkannya kebijakan ini adalah untuk mempermudah pemerintah daerah dalam melakukan pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan terkait urusan daerah secara langsung tanpa adanya ikut campur dari pemerintah pusat (Nadeak et al., 2022). Teknik manajemen desentralisasi dilakukan agar pembangunan terjadi secara merata pada seluruh wilayah Indonesia. Desentralisasi timbul karena adanya kesadaran, bahwa pembangunan merupakan suatu proses yang penuh dengan ketidakpastian dan kompleks. Sehingga tidak mudah jika hanya dipegang oleh pusat. Selain itu, penyerahan tanggung jawab dari pemerintah pusat pada pemerintah daerah ini terjadi karena pemerintah daerah dinilai sebagai elemen yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sehingga diharapkan dapat mendorong terwujudnya pembangunan yang adil menyesuaikan kebutuhan masyarakat..

Salah satu tolak ukur yang dapat digunakan dalam melakukan pengukuran pada tingkat keberhasilan dari pembangunan ialah melalui laju pertumbuhan ekonomi. Pengertian pertumbuhan ekonomi menurut Kurniawan., Dkk. (2021), merupakan suatu proses dimana negara secara terus menerus berusaha mengubah kondisi dari perekonomiannya menuju arah yang positif dalam jangka waktu

tertentu. Pada dasarnya pertumbuhan ekonomi membicarakan tentang peningkatan pada produksi barang serta jasa. Pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi pada suatu wilayah, dapat menyebabkan kenaikan pada proses peningkatan produksi. Hal tersebut memberikan dampak pada meningkatnya pendapatan serta kesejahteraan yang dirasakan masyarakat dan menambah prospek pembangunan pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi membutuhkan kerja sama dari masyarakat, pemerintah dan semua elemen pada suatu negara untuk ikut andil dan berpartisipasi aktif disetiap prosesnya (Sri Hartati, 2021).

Gambar 1. 1 Pertumbuhan Ekonomi



Sumber data : Badan Pusat Statistik (diolah)

Gambar 1.1 diatas menunjukkan laju pertumbuhan perekonomian di kawasan provinsi Jawa tengah tahun 2020 sempat mengalami penurunan drastis menyentuh angka -2,65 persen. Hal ini diakibatkan karena pada tahun itu terjadi pandemi virus corona yang melumpuhkan perekonomian dunia. Namun tingkat

pertumbuhan ekonomi kembali naik untuk tahun setelahnya yakni pada tahun 2021 – 2022 seiring dengan pemulihan negara paska pandemi, aktivitas perekonomian juga perlahan pulih.

Pemerintah memiliki peran besar dalam upaya mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Upaya tersebut diwujudkan melalui penerapan kebijakan fiskal dengan dua unsur utama yakni penerimaan dan pengeluaran. Menurut Lativa (Lativa, 2021), kebijakan fiskal ialah kebijakan yang mengatur keterkaitan antara kinerja perekonomian melalui mekanisme pemasukan dan pengeluaran pemerintah. Penerimaan atau pemasukan negara umumnya berasal dari pajak yang dipungut dan digunakan kembali untuk kemakmuran rakyat. Sementara itu, pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah banyak dibelanjakan untuk membangun fasilitas umum, membiayai sektor penting seperti pendidikan dan juga kesehatan dan lain sebagainya. Penerimaan serta pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah tersebut diatur melalui APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau APBD pada tingkat daerah.

Pada dasarnya tujuan dari kebijakan fiskal ialah tentang pengadaan investasi. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melakukan dorongan investasi pada bidang sosial serta ekonomi. Pada bidang ekonomi diwujudkan melalui pengadaan sarana publik seperti, transportasi, jalan, jembatan yang dimaksudkan untuk overhead ekonomi. Sedangkan pada bidang sosial berupa investasi dibidang kesehatan, fasilitas latihan, pendidikan untuk overhead sosial. Tujuan dari keduanya yaitu untuk memperluas pasar, mengurangi biaya produksi dan meningkatkan produktivitas.

Selain pertumbuhan ekonomi, terdapat aspek lain yang sangat memiliki peran penting dalam mewujudkan pembangunan negara, yakni pembentukan modal manusia. Menurut buku Ekonomi pembangunan dan perencanaan (Jhingan, 2008), pembentukan modal manusia ialah suatu proses yang dilakukan guna mendapatkan serta meningkatkan jumlah dari masyarakat yang memiliki keahlian serta pendidikan dan juga pengalaman yang dapat dimanfaatkan untuk membantu pembangunan ekonomi serta politik suatu negara. Pembentukan pada modal manusia ini juga dapat didefinisikan sebagai investasi pada manusia.

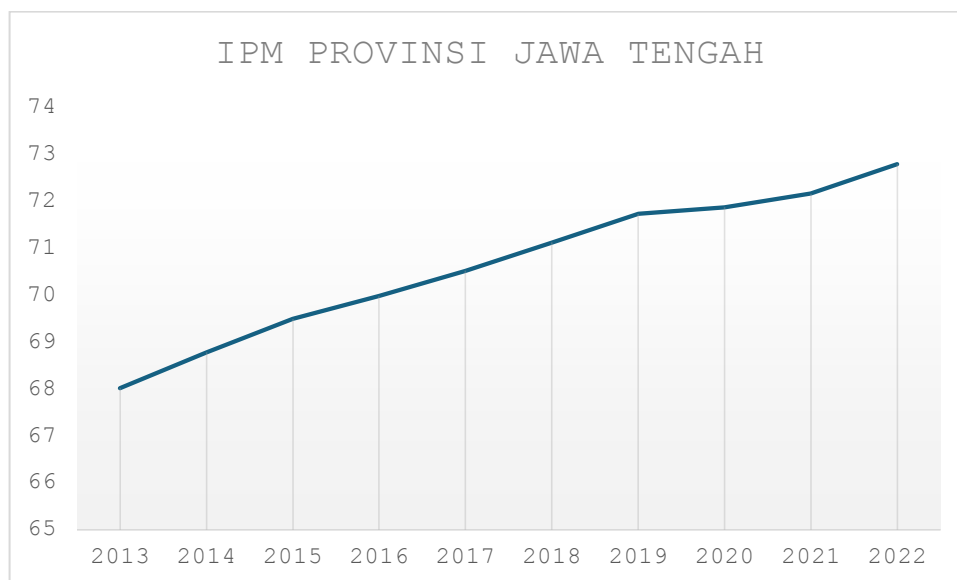
Negara Indonesia dihadapkan dengan permasalahan tenaga kerja dimana sumber daya manusia yang dimiliki oleh negara berlimpah. Namun kebanyakan dari mereka tidak memiliki keterampilan yang sesuai, seperti apa yang dibutuhkan pada pasar tenaga kerja. Imbas dari ke tidak sesuaian ini ialah terjadinya pengangguran. Menurut (Sejati, 2020), istilah pengangguran sendiri didefinisikan sebagai keadaan ketika seseorang yang sudah memasuki usia kerja tidak punya pekerjaan dan juga pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Sehingga terjebak ke dalam jurang kemiskinan.

Kemiskinan adalah suatu permasalahan yang sering terjadi pada negara berkembang seperti negara Indonesia. Kemiskinan merupakan suatu keadaan ketika seorang individu tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar mereka, baik kebutuhan sandang maupun pangan. Menurut (Emilia Khristina Kiha, Sirilius Seran, 2021), kemiskinan bukan hanya terjadi karena permasalahan pendapatan. Namun juga berkaitan dengan masalah pendidikan, kesehatan dan juga kesenjangan kesempatan. Gambaran dari kemiskinan pada suatu negara dapat

dilihat melalui gizi buruk, perumahan kumuh, kesehatan masyarakat dan juga tingkat pendidikan yang masih rendah. Penyebab dari pengangguran dan kemiskinan bisa terjadi karena beberapa faktor, namun sering kali terjadi karena rendahnya tingkat kualitas dari SDM.

Salah satu cara yang bisa digunakan dalam melihat tingkat kualitas dari SDM suatu wilayah ialah dengan melihat angka dari Indeks Pembangunan Manusia. IPM merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur pencapaian dasar pembangunan manusia melalui 3 dimensi, yakni pendidikan (dilihat dari angka melek huruf dan juga rata lama sekolah), kesehatan (dilihat dari angka harapan hidup), dan juga standar hidup layak (dilihat dari daya beli masyarakat).

Gambar 1. 2 IPM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2022



Sumber data : Badan Pusat Statistik (diolah)

Grafik pertumbuhan indeks pembangunan manusia di provinsi Jawa Tengah selama tahun 2013 – 2022 memperlihatkan adanya kenaikan pada IPM

untuk setiap tahunnya, dimana kenaikan tersebut dapat menunjukkan keseriusan dari pemerintah dalam mengatasi permasalahan modal manusia lewat pengadaan berbagai terobosan dan kegiatan yang dapat menstimulus nilai IPM.

Nilai IPM yang tinggi pada suatu daerah menunjukkan pencapaian pembangunan dan kesejahteraan manusia semakin baik yang akan berakibat pada menurunnya jumlah penduduk miskin baik dari sisi jumlah maupun kualitas. Untuk merangsang pertumbuhan IPM, dibutuhkan peran pemerintah untuk membuat kebijakan yang dapat menstimulasi pertumbuhan nilai IPM yang lebih tinggi. Salah satunya melalui belanja pemerintah. Yakni belanja pemerintah yang dikeluarkan untuk pembiayaan sektor yang menjadi prioritas bagi peningkatan SDM. yaitu belanja pada bidang pendidikan dan kesehatan serta sosial. Selain itu faktor lain yang dapat memberikan pengaruh pada nilai IPM yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan pendidikan serta kesehatan.

Dengan mempertimbangkan alasan tersebut maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Belanja Daerah, Tingkat Pengangguran, Tingkat Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Pada Tahun 2013 – 2022)”. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis regresi data panel melalui tiga model pendekatan yaitu *Common Effect Model (CEM)*, *Fixed Effect Model (FEM)*, dan *Random Effect Model (REM)*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang tersebut. Maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh dari belanja daerah terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Jawa Tengah selama tahun 2013 – 2022?.
2. Bagaimana pengaruh dari tingkat pengangguran terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Jawa Tengah selama tahun 2013 – 2022?.
3. Bagaimana pengaruh dari tingkat kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Jawa Tengah selama tahun 2013 – 2022?.
4. Bagaimana pengaruh dari pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Jawa Tengah selama tahun 2013 – 2022?.
5. Bagaimana pengaruh dari pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Jawa Tengah selama tahun 2013 – 2022?.
6. Bagaimana pengaruh dari kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Jawa Tengah selama tahun 2013 – 2022?.

1.3 Batasan Penelitian

Agar penelitian mengenai “Analisis Pengaruh Belanja Daerah, Tingkat Pengangguran, Tingkat Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Pada Tahun 2013 – 2022)”. Lebih

terfokus dan tidak keluar dari maksud bahasan yang diinginkan. Maka penelitian ini dapat difokuskan pada :

1. Subjek yang digunakan pada penelitian ini ialah kabupaten dan juga kota yang terdapat di kawasan provinsi Jawa Tengah.
2. Penelitian ini membatasi analisis pada periode waktu tahun 2013 – 2022. Sehingga hasil analisis mungkin berbeda sesuai dengan periode waktu dan kondisi ekonomi pada saat itu.
3. Penggunaan variabel terbatas pada belanja daerah, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan pendidikan serta kesehatan sebagai variabel independen dan indeks pembangunan manusia sebagai variabel dependen.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pengaruh belanja daerah terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Jawa Tengah selama tahun 2013 – 2022?.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengangguran terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Jawa Tengah selama tahun 2013 – 2022?.
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Jawa Tengah selama tahun 2013 – 2022?.

4. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Jawa Tengah selama tahun 2013 – 2022?.
5. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Jawa Tengah selama tahun 2013 – 2022?.
6. Untuk mengetahui pengaruh kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Jawa Tengah selama tahun 2013 – 2022?.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak di capai penulis dalam penelitian ini adalah.

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dijadikan sebagai bentuk pengembangan kemampuan dalam bidang penelitian, kepenulisan dan juga penerapan ilmu yang penulis dapat selama perkuliahan. Penelitian serta memberikan wawasan kepada penulis mengenai peran belanja pemerintah daerah bagi perkembangan pembangunan di wilayah Indonesia.

2. Bagi Pemerintah

Penulis berharap penelitian ini dapat berguna sebagai masukan dalam pembuatan kebijakan serta pengambilan keputusan bagi pemerintah dalam melakukan belanja daerah dengan mempertimbangkan tiga aspek penting bagi pembangunan. Yakni investasi pada bidang ekonomi, sosial dan juga investasi pada pembentukan modal manusia.

3. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai referensi serta bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian selanjutnya.

4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai wawasan bagi masyarakat akan penggunaan belanja daerah. Sehingga diharapkan masyarakat dapat ikut mengambil bagian dalam melakukan pengawasan dan juga evaluasi terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.